

POTENSI BLUE ECONOMY INDONESIA PASCA COVID-19

Sitti Afifah Sidqiyah Halada, Agussalim Burhanuddin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Article Info	ABSTRACT
<p>Keywords:</p> <p><i>Blue Economy</i> <i>Covid-19 Pandemic</i> <i>Economic Recovery</i></p>	<p><i>As we know, the pandemic has changed all aspects of human life, including the economy. Following the pandemic, the government has implemented a number of programs to boost the economy. Blue economy is one of the ways applied for national economic recovery. The potential that Indonesia has in the blue economy sectors is very large so that it is expected to contribute to the recovery of the national economy. For this reason, this article is written to find out the potential of the blue economy in post-pandemic national economic recovery. The research uses a qualitative approach with a literature review method. The result of the analysis is by presenting the blue economy sectors that have great potential in restoring the Indonesian economy. These sectors are both sectors that have been developed and sectors that have not been developed but have great potential in contributing to the country's economy if developed.</i></p>
<p>Info Artikel</p> <p>Kata Kunci:</p> <p><i>Blue Economy</i> Pandemi Covid-19 Pemulihan Ekonomi</p> <hr/> <p>Corresponding Author: agus.unhas@gmail.com</p>	<p>SARI PATI</p> <p>Seperti yang diketahui, pandemi telah mengubah seluruh aspek kehidupan manusia tidak terkecuali ekonomi. Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi. <i>Blue economy</i> menjadi salah satu cara yang diterapkan untuk pemulihan ekonomi nasional. Potensi yang dimiliki Indonesia di sektor-sektor <i>blue economy</i> sangat besar sehingga diharapkan bisa berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, artikel ini ditulis untuk mengetahui potensi <i>blue economy</i> dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode <i>literature review</i>. Hasil dari analisis yaitu dengan memaparkan sektor-sektor <i>blue economy</i> yang berpotensi besar dalam memulihkan perekonomian Indonesia. Sektor-sektor tersebut baik sketor yang telah dikembangkan maupun sektor yang belum dikembangkan akan tetapi memiliki potensi besar dalam kontribusi perekonomian negara apabila dikembangkan.</p>

PENDAHULUAN

Sejak kemunculannya pada 2020, Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Data dari WHO menunjukkan kurang lebih terdapat 6 ribu kasus kematian akibat dari pandemi Covid-19 (covid.who.int). Pandemi ini tidak hanya mengakibatkan mengakibatkan jatuhnya korban, tapi juga berdampak pada perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Salah satu sektor yang paling merasakan dampak akibat dari pandemi adalah sektor ekonomi.

Kasus pertama Covid-19 di Indonesia dikonfirmasi pada Maret 2020 yang kemudian menyebar hampir diseluruh wilayah Indonesia. Untuk menangani pandemi ini, pemerintah melakukan sejumlah upaya, salah satunya dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disebut dengan PSBB. Sekolah ditutup dan pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh. Sejumlah perusahaan mengalami kerugian yang kemudian berakibat pada PHK besar-besaran. Lebih dari 1,5 juta pekerja harus dirumahkan yang dimana 90% pekerja dirumahkan dan pekerja yang di PHK sebanyak 10% (Yamali dan Putri, 2020).

Pandemi menyebabkan banyak perusahaan tutup dan berhenti beroperasi. Sektor UMKM adalah yang paling merasakan akibat adanya pandemi. Data dari Bappenas pada tahun 2021 menunjukkan jika hampir seluruh UMKM yang beroperasi mengalami penurunan pendapatan 97%-100% selama masa pandemi. Banyak UMKM juga yang harus menutup usaha karena kurangnya pendapatan. Banyaknya UMKM yang tutup usaha mengakibatkan jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan naik, apalagi mengingat UMKM adalah sektor dengan penyerapan tenaga kerja paling banyak.

Selain itu, kerugian di sektor pariwisata juga secara tidak langsung berdampak pada UMKM. Usaha yang dikelola di destinasi pariwisata didominasi oleh UMKM. Dengan berkurangnya jumlah wisatawan di masa pandemi tidak hanya berdampak pada sektor pengelolaan lokasi pariwisata tetapi juga usaha-usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi pariwisata tersebut. UMKM di lokasi pariwisata sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, sehingga dengan berkurangnya jumlah wisatawan menyebabkan pendapatan UMKM pun berkurang.

Sejumlah upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menangani krisis perekonomian di masa pandemi ini. Menurut pernyataan dari BPK, pada tahun 2020 anggaran dana penanganan Covid-19 mencapai Rp1.035, 25 triliun. Kemudian, pada tahun 2021, pemerintah melakukan *refocusing* anggaran untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 dengan melakukan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp780,48 triliun (Kemenko, 2021). Alokasi dana ini ditujukan untuk mendukung penanganan kesehatan, pengamanan sosial, dan pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi nasional difokuskan kepada pemulihan sektor UMKM dan pariwisata.

Blue economy menjadi salah satu potensi perekonomian yang bisa berkontribusi dalam pemulihan perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19. Potensi blue economy di Indonesia sangat besar, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lautan yang luas, menyebabkan Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang melimpah. Diperkirakan, sumberdaya kelautan Indonesia mendukung kegiatan ekonomi Indonesia dengan jumlah lebih dari USD180 miliar setiap tahunnya (Nasution, 2022). Adapun sektor-sektor kelautan yang dimiliki Indonesia yaitu perikanan, kelautan, pengolahan makanan berbasis kelautan, energi dan mineral, pariwisata pesisir, manufaktur, transportasi, dan perdagangan. Selain itu, beberapa potensi kelautan belum dikelola dengan baik akan tetapi memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti energi terbarukan, bioekonomi, dan bioteknologi.

Sektor-sektor *blue economy* tidak lepas dari dampak akibat adanya pandemi Covid-19. Beberapa sektor seperti perdagangan, transportasi, pariwisata pesisir, dan industri makanan yang pelakunya berupa UMKM mengalami penurunan pendapatan. Akan tetapi beberapa sektor mengalami peningkatan dan bahkan berpotensi untuk dikembangkan di

tengah pandemi. Sektor seperti bioteknologi yang memproduksi obat-obatan berbasis produk kelautan mulai berkembang di tengah pandemi. Hal ini menunjukkan potensi blue economy yang dimiliki Indonesia dapat menjadi solusi untuk pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Tulisan ini akan membahas mengenai potensi *blue economy* Indonesia dan bagaimana potensi menjadi solusi untuk pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19.

METODE

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur. Kajian literatur dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dari buku, artikel jurnal, laporan/dokumen, berita, dan website. Sumber-sumber data berasal dari laporan baik dari organisasi pemerintah maupun organisasi nasional dan internasional seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemendagri), Badan Pusat Statistik (BPS), dan World Health Organization (WHO). Informasi dan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk tulisan berupa deskripsi mengenai potensi *blue economy* Indonesia yang dapat menjadi solusi bagi pemulihan ekonomi nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerugian ekonomi akibat pandemi

Sejak Covid-19 masuk di Indonesia pada Maret 2020, hampir seluruh kebijakan baru dikeluarkan untuk menghadapi bencana pandemi ini. Pemerintah sendiri melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang dimana ini berdampak kepada aktivitas perekonomian masyarakat yang berakibat terhadap pelemahan ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarawati dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021 mengatakan pandemi menyebabkan Indonesia kehilangan nilai ekonomi sebesar Rp. 1.356 triliun. Indonesia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 (ekonomi.bisnis.com).

Data dari BPS menunjukkan, pada tahun 2019 PDB Indonesia adalah sebesar Rp. 15.833,9 triliun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan naik sebesar 5,3% pada tahun 2020. Namun, akibat adanya pandemi, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 5,32% dimana pada triwulan II tahun 2020 PDB Indonesia hanya sebesar Rp. 3.687,7 triliun. Penurunan terjadi hampir diseluruh sektor usaha di Indonesia (Soleha, 2020).

Adapun sektor ekonomi yang terdampak akibat pandemi yaitu sektor pelayanan transportasi udara, UMKM, pariwisata, sektor hotel, restoran, dan perusahaan retail. Selain itu, pandemi juga menyebabkan perusahaan harus melakukan PHK dan merumahkan sebagian besar pekerjanya. PHK dilakukan oleh perusahaan swasta dimana 1,5 juta pekerja di rumahkan yang mana 90% pekerja dirumahkan dan 10% di PHK. Dari sektor formal terdapat 1,2 juta pekerja yang di-PHK, sedangkan dari sektor informal sejumlah 265 ribu pekerja yang dirumahkan. Alasan utama dilakukan PHK akibat perusahaan mengalami kebangkrutan di masa pandemi.

Di sektor transportasi udara mengalami kerugian akibat dari pemberhentian total pada tahun 2020. Diperkirakan sektor pelayanan transportasi udara kehilangan pendapatan sebanyak 207 miliar rupiah. Sebagian besar pendapatan yang hilang ini berasal dari penerbangan yang dilakukan dari China sebanyak 48 miliar rupiah.

Sektor berikutnya yang mengalami kerugian adalah sektor pariwisata. Akibat adanya PSBB, pengunjung yang datang untuk berwisata berkurang secara drastis. Pada semester I tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia menurun sebesar 59,7%,

dimana jumlah pengunjung yang sebelumnya berjumlah 7,7 juta orang berkurang menjadi 3.1 juta orang. Jumlah wisata kunjungan menurun sebanyak 6.800 per hari. Dengan menurunnya jumlah wisatawan asing maka berdampak pada sektor penyedia akomodasi yang salah satunya sektor perhotelan, akibatnya tingkat hunian hotel berkurang.

Sektor hunian dan perhotelan mengalami kerugian akibat dari berkurangnya kedatangan wisatawan asing. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang hanya mencapai 30% dari periode sebelumnya yang mencapai 51%. Di 10 destinasi pariwisata prioritas, tingkat penghunian hotel berbintang lima mengalami penurunan sejak Januari hingga Juni 2020. Data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menyatakan pada tahun 2020 terjadi penurunan tingkat okupansi pada sektor hotel di Indonesia sebesar 50% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Okupansi hotel yang menurun mempengaruhi bisnis perhotelan lainnya. Jumlah wisatawan yang menurun berdampak pada penurunan pendapatan oleh restoran dan rumah makan hotel. Oleh karenanya, restoran-restoran tersebut memilih untuk ditutup akibat kurangnya wisatawan yang datang berkunjung.

UMKM adalah sektor berikutnya yang paling terdampak akibat adanya pandemi. Data dari Bappenas mengungkapkan jika UMKM mengalami kerugian yang sangat besar, dimana penurunan pendapatan UMKM mencapai 97%-100% (Bappenas,2020). Akibat dari berkurangnya wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata, membuat UMKM yang beroperasi di area pariwisata harus mengalami penurunan pendapatan dana beberapa diantaranya menjadi off produksi.

Definisi *Blue Economy*

Secara sederhana, *blue economy* dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang berlangsung pada wilayah kelautan. World bank mendefinisikan *blue economy* sebagai pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mata pencaharian, serta meningkatkan lapangan pekerjaan akan tetapi tetap menjaga ekosistem laut. Gunter Pauli pertama kali memperkenalkan istilah *blue economy* dalam bukunya yang berjudul “*The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 MillionJobs*”. Dalam buku ini, Pauli menyatakan jika *blue economy* adalah gabungan dari upaya-upaya yang berdampak pada terciptanya kesadaran global yang berakar pada upaya mencari solusi praktis berdasarkan sistem pembangunan berkelanjutan (Pauli dalam *Defining the Blue Economy* oleh Godfrey, 2016).

Dalam laporan yang berjudul “*The Blue Economy: Growth, Opportunity and a Sustainable Ocean Economy*” yang diterbitkan oleh The Economist pada tahun 2015, menyatakan jika *blue economy* muncul ketika aktivitas ekonomi yang berkelanjutan muncul, dimana aktivitas ekonomi tersebut seimbang dengan kapasitas jangka panjang ekosistem laut untuk mendukung aktivitas dalam jangka panjang serta tetap tangguh dan sehat.

Blue economy memanfaatkan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi. *Blue economy* mempromosikan pembangunan ekonomi laut yang berkelanjutan. Elemen di *blue economy* itu sendiri masih menjadi perdebatan oleh berbagai negara yang mencoba menerapkan ekonomi niru, akan tetapi untuk mencapai tujuan dari ekonomi biru itu sendiri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu pengelolaan didasarkan pada prinsip *nature efficiency*. Dalam prinsip ini pengelolaan sumberdaya alam harus melalui proses yang tidak menghasilkan limbah dan tidak membuat sisa untuk limbah, yang berarti, limbah yang ada bisa dimanfaatkan untuk produksi barang selanjutnya. Kedua, prinsip kepedulian sosial. Pada prinsip ini pendapatan dan penghasilan meningkat, serta penyerapan tenaga kerja lebih banyak. Hal ini berarti memberikan peluang lebih banyak bagi masyarakat. Prinsip ketiga yaitu inovasi dan kreativitas, dimana prinsip ini mendorong untuk melahirkan bisnis yang inovatif dan kreatif. Tujuannya adalah agar penghasilan yang

didapatkan berlipatganda, lapangan pekerjaan terbuka lebih luas, akan tetapi tetap menjaga lingkungan.

Penerapan *blue economy* harus menyesuaikan dengan tujuan SDGs ke 14, dimana pemanfaatan sumber daya laut harus berfokus terhadap keberlanjutan dan konservasi laut yang berkelanjutan. Dengan menerapkan *blue economy* yang sejalan dengan SDGs ke 14 maka berarti mewujudkan pembangunan ekonomi sosial dan keseimbangan sumber daya dan lingkungan yang dinamis, Penerapan *blue economy* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan laut sebagai sumber tanpa merusak lingkungan laut dan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Blue economy belakangan banyak dilirik oleh negara-negara di dunia, khususnya negara kepulauan dan negara yang memiliki laut. Pengelolaan laut berdasarkan prinsip *blue economy* akan menciptakan ekosistem kelautan yang sehat. Laut yang sehat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi negara, menjaga keberlangsungan iklim bumi serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang menetap di wilayah pesisir. *Blue economy* bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan. Hampir seluruh masyarakat miskin mengandalkan lautan sebagai sumber pekerjaan dan makanan. Ini menegaskan mengenai pentingnya untuk menggunakan, mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan secara berkelanjutan.

Potensi *blue economy* Indonesia

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau dan dikelilingi lautan dan wilayah perairan dengan luas wilayah 1.931.578,68 km² serta terdiri dari 17.504 pulau (BPS, 2016). UU No. 1 Tahun 2014 mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, sedangkan pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (Ervianto, 2018). Hal ini menunjukkan jika Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan yang sangat besar. Apabila pengelolaan sumber daya ini tepat, maka akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Potensi sumberdaya kelautan yang sangat besar ini menjadikan Indonesia memiliki potensi *blue economy* yang sangat besar. Penerapan *blue economy* dapat menjadi solusi bagi perkembangan ekonomi Indonesia terutama pasca pandemi Covid-19, dimana ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang bahkan tidak bertumbuh saat masa pandemi. Untuk memaksimalkan potensi *blue economy* yang dimiliki Indonesia, pemerintah Indonesia di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan program Blue Economy Development Framework for Indonesia Economic Transformation. Kerangka ini merupakan penjabaran Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJN) 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN) 2020-2024. Kerangka ini menjelaskan mengenai *blue economy* Indonesia, yang secara khusus menekankan pentingnya untuk mengelola laut dengan baik agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Bappenas, 2021).

Untuk menerapkan *blue economy* di Indonesia, pemerintah mengusulkan beberapa prinsip dalam mengembangkan industri kelautan dan perikanan yang berdasarkan pada konsep *blue economy*. Prinsip pengelolaan ekonomi kelautan berdasarkan prinsip *blue economy* tersebut antara lain yaitu merumuskan kebijakan yang komprehensif yang melindungi ekonomi serta lingkungan, mendorong terjadinya pembangunan ekonomi di tingkat regional, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan ini dilakukan dengan melakukan promosi tentang bagaimana sistem produksi yang bersih dan mendorong investasi yang kreatif dan inovatif (Wenhai L, 2019). Adapun hal-hal yang akan dikembangkan dalam penerapan *blue economy* di Indonesia antara lain yaitu: mengembangkan perikanan laut, transportasi laut, pariwisata,

produksi energy dan material yang mengacu pada konsep *blue economy*; meningkatkan dan mengkoordinasikan kebijakan nasional ekonomi kelautan dan ekonomi darat; mengembangkan zona *blue economy*; memperkuat hubungan antara perdagangan dan infrastruktur serta mendorong pengembangan teknologi sumber daya manusia.

Adapun sektor *blue economy* di Indonesia antara lain yaitu:

a. Industri perikanan

Sektor perikanan Indonesia menempati posisi kedua terbesar di dunia. Sektor perikanan Indonesia menyediakan 7 juta perkerjaan dan lebih dari 50 persen kebutuhan protein hewani negara dengan nilai sekitar USD27 miliar terhadap PDB negara (World Bank, 2021). Komoditas perikanan Indonesia sendiri sangat beragam mulai dari perikanan tangkap maupun budidaya.

Pada tahun 2020, sektor ikan tangkap Indonesia mencapai 7.7 miliar dimana produksi ikan tangkap ini menjadi penyedia sumber pangan nasional dan global. Produksi ikan tangkap ini melibatkan sekitar 6,2 juta nelayan dan pembudidaya ikan pada tahun 2018 dengan rata-rata pendapatan bulanan sebesar Rp3,85 juta per nelayan (Bappenas, 2021). Adapun 5 jenis ikan tangkap yang masuk di sektor ini adalah ikan tongkol, ikan layang, caklang, cumi-cumi dan tuna. Sentra produksi ikan tangkap tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dimana sentra produksi terbanyak berada di Provinsi Sumatera Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Di sektor akuakultur atau perikanan budidaya, produksi Indonesia mencapai 42 persen dari total produksi produk perikanan. Meningkatnya permintaan produk perikanan menjadikan perikanan budidaya memiliki potensi besar dalam pengembangan perikanan Indonesia. Adapun komoditas perikanan budidaya terbesar Indonesia yaitu rumput laut, nila, lele, udang, dan bandeng. Daerah penghasil komoditas perikanan budidaya di luar rumput laut adalah provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Adapun sentra utama rumput laut berada di Propinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah (Bappenas, 2021).

b. Manufaktur dan konstruksi kelautan

Saat ini, kurang lebih 600 AMLP berada di seluruh wilayah perairan Indonesia. AMLP beroperasi di Laut Utara Jawa, Sumatera, Natuna, dan Jawa Timur. Sebagian besar AMLP didirikan selama periode 1970-an dan awal 1990-an. Beberapa AMLP telah mencapai akhir masa produksi. Menurut peta jalan dekomisioning yang dibuat oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), sekitar 102 AMLP pasca produksi disarankan untuk dibongkar atau digunakan kembali di sektor lain dalam waktu dekat.

c. Minyak dan gas

Indonesia sekarang menjadi net importir minyak dan gas bumi karena penurunan produksi keduanya sebesar 20% dari 2010 hingga 2019. Ini juga mungkin akan menjadi net importir gas bumi di masa mendatang. Saat ini, pertumbuhan ekonomi dan populasi sering menyebabkan peningkatan kebutuhan energi. Indonesia bergantung pada sumber energi konvensional seperti gas dan minyak untuk memenuhi kebutuhan energinya. Konsumsi energi final Indonesia sebesar 875 juta

barel minyak pada tahun 2018 (BRSDM KKP, 2021). Indonesia masih dalam proses mengembangkan energi terbarukan. Hanya 2% dari potensi energi terbarukan terdiri dari kombinasi energi panas bumi, air, angin, dan biomassa, dan 12% dari listrik yang berasal dari energi terbarukan.

d. Industri olahan makanan berbasis kelautan

Selama bertahun-tahun, industri olahan makanan berbasis kelautan di Indonesia telah berkembang dengan pelaku industri yang terdiri dari industri besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Produksi dari olahan makanan berbasis kelautan mayoritas berasal dari wilayah barat Indonesia dengan bahan mentah yang disediakan dari wilayah tengah dan timur Indonesia. Produk ikan olahan terutama terdiri dari tuna segar, tuna beku, tuna kaleng, udang, dan ikan kayu, dengan ikan cakalang sebagai bahan baku utama. Sumber lain berasal dari rumput laut dan ganggang yang diproses menjadi bahan makanan seperti permen, jus buah, makanan ringan, makanan beku, dan lainnya.

Dengan penyerapan tenaga kerja yang rendah, UMKM mendominasi pengolahan ikan pengalengan tuna pada tahun 2017. Pertumbuhan perusahaan pengolahan ikan ini relatif rendah, hanya 0,5% untuk UMKM dan 2% untuk industri besar. Hal ini terkait dengan margin ekonomi di produk olahan ikan yang lebih tinggi di industri pengolahan sederhana dibandingkan di industri pengolahan produk di tingkat lebih lanjut (Hidayat, et al. 2020). Industri pengolahan berbasis kelautan memperoleh nilai tambah sebesar Rp 29,96 triliun pada tahun 2019 (BPS, 2021). Pengolahan ikan menghasilkan nelayan yang lebih sedikit dan pasar yang lebih terbatas untuk produk olahan daripada ikan segar.

e. Industri bahan kimia berbasis laut

Termasuk di dalam industri ini adalah petrokimia, kimia dan barang dari karet yang menggunakan senyawa hidrokarbon, minyak bumi, dan gas alam sebagai bahan baku. Sejak 2009 hingga 2013, industri petrokimia mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 4,6 persen. Sektor ini menghasilkan 12,21 persen dari PDB di sektor industri nonmigas pada tahun 2013. Cilegon adalah pusat industri petrokimia terbesar di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dan Sucofindo menunjukkan bahwa cadangan minyak dan gas bumi masing-masing sebesar 7.534,90 MMSTB dan 142,72 TSCF. Cadangan ini terletak di Sulawesi, Maluku, Papua, Kalimantan, dan Sumatera.

f. Garam

Pemanfaatan garam digunakan untuk makanan, industri, dan pengawet. Industri garam merupakan bagian dari subsector industri kimia, farmasi dan obat tradisional dengan PDB mencapai Rp296,710 miliar. Data dari BPS menunjukkan jika produksi garam menyumbang 2 persen dari PDB nasional. Industri garam yang didalamnya termasuk industri bumbu dan produk masak memiliki mempunyai nilai tambah Rp58 triliun. Pekerja di industri garam sendiri mencapai 53.981 tenaga kerja.

g. Industri pembuatan kapal

Perusahaan kapal yang dimiliki oleh Indonesia mencapai 250 perusahaan. Perusahaan ini tersebar di seluruh Indonesia. Lokasi galangan tersebut tersebar di Sumatera (26 persen), Kalimantan (25 persen), dan Jawa (37 persen). Total kapasitas industri perkapalan ini mencapai 0,9 juta *death weight tonnage* (DWT) dengan utilisasi baru mencapai 35 persen. Data dari BPS melaporkan industri galangan kapal memperpejakan sekitar 27.601 tenaga kerja.

h. Parawisata

Indonesia dikenal dengan keindahan alam dan kekayaan budaya, yang menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata favorit. Parawisata pesisir dan kelautan merupakan contributor terbesar kedua yang mewakili kategori parawisata berbasis alam, (35 persen), setelah ekowisata (45 persen). Parawisata memberikan kontribusi bagi PDB sebesar USD 65,4 miliar pada tahun 2019. Jumlah wisatwan asing yang datang ke Indonesia sendiri mencapai 16 juta orang pada tahun 2019. Sektor parawisata juga menyediakan 12,7 juta lapangan kerja. Secara tidak langsung, sektor parawisata memberikan dampak induksi ke sektor-sektor industri lainnya terutama sektor UMKM.

Untuk meningkatkan kontribusi sektor parawisata dalam perekonomian nasional, dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah menetapkan 10 Destinasi Parawisata Prioritas (DPP). Dari 10 lokasi DPP ini, 7 diantaranya merupakan destinasi wisata yang berada di wilayah pesisir. Hal ini menandakan jika, potensi parawisata pesisir dan parawisata berbasis kelautan Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap sektor parawisata Indonesia.

i. Perdagangan, transportasi dan logistik

Pada tahun 2018, 95 persen ekspor global Indonesai diangkut melalui laut. Untuk angkutan penumpang laut sendiri, Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah penumpang kapal yang berangkat naik sebesar 10,71 persen dan penumpang turun naik sebesar 11,37 persen (Bappenas, 2021). Jumlah ini naik jika dibandingkan dengan tahun 2018. Untuk sektor pengangkutan dan pergudangan menyumbang terhadap perekonomian Indonesia sebesar USD 63,4 miliar atau sama dengan menyumbang 5,57 persen dari PDB Indonesia di tahun 2019. Di tahun 2013, pelayaran laut memiliki nilai tambah yang menyumbang 1,3 persen kegiatan ekonomi kelautan Indonesia. Berdasarkan data dari OECD yang menunjukkan nilai tambah bruto/*gross value added*, jika dibandingkan dengan negara ASEAN, pada tahun 2015, penghasilan nilai tambah angkutan laut Indonesia merupakan yang terbesar, yaitu mencapai USD 2,6 miliar atau 8,0 persen dari harga konstan 2010 dan angkutan penumpang laut yang mencapai USD 2,2 miliar, atau 7,0 persen. (Bappenas, 2021).

Selain itu, terdapat sektor *blue economy* yang belum dikembangkan secara optimal. Sektor-sektor tersebut antara lain yaitu:

a. Energi terbarukan

Sepanjang tahun 2019, Indonesia menambahkan 385 MW energy terbarukan, sehingga total energy terbarukan mencapai 10.169 MW atau meningkat 3 persen dari tahun ke tahun. Dari segi pembangkitan, energi terbarukan hanya berkontribusi sebesar 12,2 persen dari bauran kapasitas terpasang pada tahun 2019. Hal ini

menunjukkan bahwa bauran energi terbarukan telah stagnan sejak tahun 2011, berkisar antara 11 persen hingga 13 persen dari bauran sumber energi listrik bertenaga air dan panas bumi yang telah menjadi kontributor utama.

b. Bioekonomi

Salah satu sumber daya alam mempunyai nilai jasa dan ekonomi yang tinggi adalah rumput laut. Pertumbuhan sektor produksi rumput laut terjadi sangat cepat. Penghasilan dari rumput laut lebih dari USD 13 miliar per tahun serta memiliki potensi signifikan untuk inovasi khususnya pada pengembangan produk kosmetik dan farmasi. Rumput laut menjadi kontributor yang paling signifikan terhadap produksi akuakultur di Indonesia. Rumput laut menjadi penggerak ekonomi masyarakat. 80 persen ekspor rumput laut berupa bahan mentah kering bernilai rendah yang dikirim ke China, Korea Selatan, dan Vietnam.

c. Bioteknologi

Potensi bioekonomi Indonesia yang besar akan maksimal jika tidak mendapat dukungan dari lingkungan serta teknologi yang memadai. Bioteknologi sendiri dapat melipatgandakan produktivitas usaha budidaya perikanan. Potensi pengembangan bioteknologi kelautan berkontribusi pada tantangan sosial seperti berkelanjutan, ketahanan pangan, ketahanan energy berkelanjutan, kesehatan lingkungan, kesejahteraan manusia, serta penghijauan produk. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang sumber daya laut. Pengembangan bioteknologi dapat menjadi solusi terhadap pembangunan ekonomi biru Indonesia yang berkelanjutan.

Kontribusi *blue economy* dalam memulihkan perekonomian Indonesia pasca Covid-19

Strategi pengembangan ekonomi berbasis kelautan telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam RPJMN ini pemerintah menetapkan salah satu dari prioritas pembangunan adalah pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman. Selain itu, rencana pengembangan ekonomi berbasis kelautan ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. Adanya kebijakan dari pemerintah mengenai pengelolaan ekonomi berbasis kelautan menunjukkan adanya fokus dalam pengembangan ekonomi Indonesia berbasis konsep *blue economy*.

Sektor-sektor *blue economy* juga merupakan sektor yang merasakan dampak akibat adanya pandemi Covid-19. Pandemi yang terjadi berdampak jangka panjang pada sektor berbasis laut secara umum. Disisi lain, pandemi ini tidak selamanya berakibat buruk pada sektor-sektor ekonomi *blue economy*. Beberapa sektor mengalami pengembangan di masa pandemi, seperti bioteknologi kelautan untuk aplikasi medis (OECD, 2020b). *Blue Economy* menjadi solusi bagi Indonesia untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi. Potensi ekonomi kelautan Indonesia sangat besar, sehingga dengan menerapkan pengelolaan ekonomi kelautan dengan menerapkan *blue economy* dapat memaksimalkan potensi tersebut dan tetap menjaga keberlangsungan kehidupan di laut.

Sektor-sektor *blue economy* yang mengalami kerugian akibat adanya pandemi antara lain yaitu sektor pariwisata dan sektor industri pengolahan makanan berbasis kelautan. Pelaku usaha di sektor industri pengolahan makanan berbasis kelautan sendiri didominasi oleh UMKM, sedangkan sektor pariwisata secara tidak langsung berkaitan dengan UMKM. Dengan adanya pandemi, UMKM mengalami kerugian yang sangat besar, dimana penurunan pendapatan UMKM mencapai 97%-100% (Bappenas, 2020).

Disisi lain, UMKM sendiri merupakan solusi pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemi. Hal ini dikarenakan jumlah UMKM yang banyak serta kemampuannya yang besar

dalam penyerapan tenaga kerja. Usaha mikro sendiri terbukti dapat bertahan menghadapi krisis ekonomi. Hal ini dikarenakan perputaran transaksi UMKM yang bersifat yang cepat dan menggunakan produk lokal serta aktivitas UMKM yang berinteraksi secara langsung melalui pemenuhan kebutuhan primer masyarakat. Untuk UMKM sektor pengolahan makanan berbasis kelautan, pemerintah sendiri memberikan pembiayaan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dimana program ini telah diluncurkan sejak tahun 2007. Selain itu terdapat investasi yang dilakukan oleh swasta. Jumlah investasi ini sendiri meningkat dengan kenaikan rata-rata per tahun 147,4% dan 130% bahkan saat pandemi (Keliat et al, 2022).

Untuk mendukung pemulihan UMKM sektor pengolahan makanan berbasis kelautan, pemerintah meralisasikan KUR pada triwulan I tahun 2022 sebesar Rp2,46 triliun dengan penerima KUR sebanyak 61.091 debitur (KKP, 2022). Penyaluran KUR terbesar adalah pada usaha budidaya sebesar Rp 871,38 miliar, disusul usaha pengolahan dan pemasaran sebesar Rp.870, 99 miliar, dan usaha penangkapan sebesar Rp547,56 miliar. Adapun persebaran KUR terbesar beradi di Provinsi Jawa Tengah dengan Rp362,3 miliar, Jawa Timur sebanyak Rp354,8 miliar, Sulawesi Selatan sebanyak Rp239, 4 miliar, dan Jawa Barat sebanya Rp230,9 miliar. Dengan adanya peningkatan alokasi pendanaan terhadap UMKM berbasis kelautan, UMKM diharapkan dapat terus bertumbuh dan berkontribusi dalam pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memulihkan perekonomian nasional.

Parawisata menjadi fokus pemerintah untuk pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi. Dengan adanya 10 Destinasi Parawisata Prioritas (DPP), pemerintah berfokus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal di lokasi parawisata tersebut. 7 dari 10 lokasi DPP berlokasi di pesisir yang diaman membutuhkan fokus khusus pada keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam. Dengan sejumlah rencana pemulihan sektor parawisata pasca pandemi, destinasi parawisata pesisir dan kelautan dapat menjadi katalisator untuk pembangunan berkelanjutan jangka panjang dan inklusif serta meningkatkan ketahanan sistemik (Bappenas, 2021). Dengan menerapkan prinsip *blue economy* dalam pengelolaan destinasi parawisata pesisir dan kelautan dapat berkontribusi dalam melindungi sumber daya alam laut.

Selain itu, terdapat sejumlah potensi *blue economy* yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Sektor tersebut antara lain yaitu energi terbarukan, bioteknologi, dan bioekonomi. Pengembangan sektor-sektor ini tidak hanya menjadi solusi untuk memulihkan ekonomi Indonesia pasca pandemi, akan tetapi kedepannya dapat memenuhi kebutuhan negara, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan negara.

Indonesia memiliki potensi energi terbarukan laut sebanyak 60.00 MW. Berdasarkan estimasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESD,) pada tahun 2009 dan Direktorat Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, ESDM (2014), potensi energi laut di Indonesia mencapai 49 GW. Akan tetapi, kontribusi energi dalam memenuhi kebutuhan energi negara sendiri masih sangat rendah. Hal ini sendiri karena kurangnya investasi untuk pengembangan energi terbarukan. Oleh karenanya, untuk memaksimalkan potensi energi terbarukan ini, diperlukan dukungan dari pemerintah untuk pengembangan energi terbarukan serta regulasi yang mempermudah investasi pengembangan energi terbarukan. Hal ini menjadi urgensi bagi pemerintah Indonesia, terlebih permintaan energi yang terus meningkat, sedangkan ketersediaan sumber energi fosil semakin menurun. Dengan mengembangkan potensi energi terbarukan dapat memenuhi kebutuhan energi negara.

Kemudian di sektor biekonomi dan bioteknologi, Indonesia memiliki sumber daya bioekonomi berupa alga dan invertebrate yang jika diolah menjadi produk komersial, khususnya di produk farmasi dan kesehatan, mempunyai nilai eknomi yang tinggi. Selama

ini, pemanfaatan alga dilakukan secara tradisional dengan mengolahnya sebagai makanan, pakan, atau pupuk. Adanya tren gaya hidup sehat yang memanfaatkan produk kesehatan dan makanan berbasis alga bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan bioekonomi lewat alga ini. Jika Indonesia bisa mengembangkan potensi bioekonomi alga dan bisa memenuhi permintaan pasar, maka Indonesia bisa meningkatkan pendapatan nasional melalui tingkat sektor bioekonomi.

Sektor bioteknologi Indonesia juga memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Laut Indonesia menyediakan berbagai macam sumber daya hayati yang dapat dikembangkan menjadi berbagai macam produk serta aplikasi bioteknologi lingkungan. Beberapa biota laut dan perikanan memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai produk industri bioteknologi yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai bahan bakunya. Penelitian terbaru mengungkapkan beberapa dari sumber daya hayati laut dapat dikembangkan menjadi antibiotik baru yang dimana hal ini menjadi solusi baru untuk memerangi pandemi (Bappenas, 2021). Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia harus mempertimbangkan untuk mengeksplorasi potensi bioteknologi serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang terkait ini secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Blue economy menjadi salah satu solusi untuk memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi. Dengan potensi sumber daya laut yang melimpah, pengolahan sumber daya kelautan berdasarkan prinsip *blue economy* bisa memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Adapun untuk realisasi penerapan *blue economy* diatur di RPJMN 2020-2024. Untuk pemulihan ekonomi nasional pemerintah berfokus pada pemulihan UMKM dan pariwisata. Sektor pengolahan makanan berbasis kelautan didominasi oleh UMKM mendapatkan bantuan berupa pemberian modal usaha. Sektor pariwisata yang juga secara tidak langsung berkaitan dengan UMKM. 7 dari 10 lokasi Destinasi Pariwisata Prioritas (DDP) merupakan pariwisata pesisir yang menjadi prioritas pemerintah untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Selain itu juga terdapat sektor-sektor yang belum dikembangkan yaitu energi terbarukan, bioekonomi, dan bioteknologi. Dengan meningkatnya kebutuhan energi dan sumber energi fosil yang semakin langka, maka energi terbarukan bisa menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Kemudian adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya gaya hidup baru yang memanfaatkan makanan berbasis alga menjadi potensi baru bagi sektor perekonomian Indonesia di bidang bioekonomi dan bioteknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad STAI Abdul Kabier, T. K. (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di masa Pandemi Covid 19*. 3(1), 67–77. <https://doi.org/10.52593/mtq.03.01.05>
- Arianto, B. (2020). *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia*. 2(2).
- Ekonomi, J., & Bisnis, D. (2020). *Konsep blue economy terhadap pembangunan ekonomi di indonesia*. 22(1).
- Bappenas. (2021, November 25). *Bappenas Luncurkan Blue Economy Development Framework For Indonesias Economic Transformation*. <https://bappenas.go.id/berita/bappenas-luncurkan-blue-economy-development-framework-for-indonesias-economic-transformation-NNTgJ>.
- Fachrizah, H., Rezki, J. F., Revindo, M. D., Daniswara, R. V., Pathonangi, R., & Machmud, T. Z. (2020). *Laporan Analisis Kebijakan Penanggulangan Dampak Covid-19 Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*.
- Hadiwardoyo, W., Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah, S., & Barat, J. (t.t.). *Kerugian ekonomi nasional akibat pandemi covid-19*. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Joshua Samuel Haposan Siahaan, G., Kunci, K., Biru, E., Sumber Daya Perikanan, K., & Laut Internasional, H. (2023). *SKEMA EKONOMI BIRU DALAM UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA DAN KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA*

- PERIKANAN DI INDONESIA. Dalam *Jurnal Kertha Desa* (Vol. 11, Nomor 3). <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/38894-ekonomi-biru-untuk-laut-sehat>
- KKP. (2022, April 27). *Strategi KKP Bikin UMKM Kelautan dan Perikanan Bisa Nikmati KUR*. <https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/40244-strategi-kkp-bikin-umkm-kelautan-dan-perikanan-bisa-nikmati-kur>.
- Nasution, M. (t.t.). Potensi Dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Kajian Literatur The Potential And Challenges Of The Blue Economy In Supporting Economic Growth In Indonesia: Literature Review. Dalam *Jurnal Budget* (Vol. 7, Nomor 2).
- Pambudi, A. S., Fikri Masteriarsa, M., Dwifebri, A., Wibowo, C., Amaliyah, I., Adhitya, D., & Ardana, K. (2020). *Majalah Media Perencana Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Volume* (Vol. 1, Nomor 1).
- Pane, D. D. P., Tortora, P., Anindito, I. A., Setyawati, Pertamawati, L. H., Wikapuspita, T., Ardana, A. K., Manullang, R. A., Mulyaningsih, D., Abdullah, R. R., Ashari, A. S., Munthe, R. P., Harianto, S. K., Surya, I. R., Rafi, M. A., Yudhistira, E., Artika, K., Nurhaditia, F., Suharyana, A., & Rachmanto, U. N. (2021). *Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation*.
- Rimadias, S., Ekonomi, F., & Rimadias Manajemen, S. (2023). *Faktor penentu kelangsungan hidup UMKM di Indonesia pasca pandemi Covid-19* *JMSAB* 15. 6(1), 15–28. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v6i1.579>
- Smith-Godfrey, S. (2016). Defining the blue economy. *Maritime Affairs*, 12(1), 58–64. <https://doi.org/10.1080/09733159.2016.1175131>
- Soleha, A. R. (t.t.). *Kondisi umkm masa pandemi covid-19 pada pertumbuhan ekonomi krisis serta program pemulihan ekonomi nasional*.
- Suryahadi, A., Al, R., & Suryadarma, I. D. (t.t.). *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*. www.smeru.or.id.
- Wenhai, L., Cusack, C., Baker, M., Tao, W., Mingbao, C., Paige, K., Xiaofan, Z., Levin, L., Escobar, E., Amon, D., Yue, Y., Reitz, A., Sepp Neves, A. A., O'Rourke, E., Mannarini, G., Pearlman, J., Tinker, J., Horsburgh, K. J., Lehodey, P., ... Yufeng, Y. (2019). Successful blue economy examples with an emphasis on international perspectives. Dalam *Frontiers in Marine Science* (Vol. 6, Nomor JUN). Frontiers Media S.A. <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00261>
- WHO, *WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard*. (2023). <https://covid19.who.int/?mapFilter=cases>.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>